KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Energi Atasi Kekosongan Regulasi
Tanggal : Selasa, 19 Februari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 8

LEGISLATIF

RUU Energi Atasi Kekosongan Regulasi

JAKARTA–Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) digodok di DPR RI. Adanya RUU Energi tersebut, merupakan upaya yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi aturan perundang-undangan saat ini.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengungkapkan, Indonesia telah memiliki UU Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi. Sehingga RUU EBT ini dinilai untuk melengkapi undang-undang yang telah ada.

"RUU EBT dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya," ungkapnya, Senin (18/2). Untuk itu, kata dia, berbagai pemangku kepentingan mulai dari DPR, pemerintah, pengusaha dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama. Ia berpendapat bahwa salah satu hal yang akan menjadi perdebatan alot adalah terkait fiskal insentif karena pasti ada beragam permintaan yang masuk.

"Saat ini pasokan listrik dalam negeri sebagian besar masih disuplai oleh sumber energi fosil," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat lambat meski Indonesia kaya akan potensi sumber daya EBT. Sepanjang 2015–2018, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hanya 882 mega watt (MW). Padahal, di era sebelumnya, yakni 2010–2014, kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai 2.615,7 MW.

"Kalau ini diteruskan sampai 2019, jumlah itu hanya bertambah 300 MW sehingga total kapasitas maksimum hanya 1.200 MW," jelasnya. **(ant)**